Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Pongedar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn

Judge's Consideration in Making Narcotics Criminal Decisions Conducted Distributors on Decision No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn

Erick Wellington Sirait & Rafiqi *

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: November 2018; Diterbitkan: Januari 2019

*Corresponding Email: rafiqi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Obat terlarang ini dengan mudah membuat korban di lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum ikut terlibat sebagai pongedar dan pemakai Narkoba. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana Narkotika dalam perkara Putusan No. 2071/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang di putusan oleh Hakim telah sesuai dengan teori keadilan. Untuk membahas masalah ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tulis, dan metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan mengambil Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yaitu kasus Tindak Pidana Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan serta memutuskan perkara tindak pidana narkotika pada putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/PN-Mdn adalah telah terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Pongedar

Abstract

Narcotics circulation and abuse cases in Indonesia are at a very alarming level. This illegal drug easily makes victims in the community, even law enforcement officials involved as dealers and users of drugs. The problem that will be discussed is the judge's consideration of the Narcotics crime in the Decision No. case. 2071 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn which was decided by the Judge was in accordance with the theory of justice. To discuss this problem, research was carried out using library research methods, namely by conducting research on various written reading sources, and Field Research methods, namely by taking Decision No: 2071 / Pid.Sus / 2016 / PN .Mdn is the case of Narcotics Crime which is related to the title of this Thesis. The results showed that the judges' consideration in dropping and deciding cases of narcotics crimes in the decision No: 2071 / Pid.Sus / 2016 / PN-Mdn was the fulfillment of the elements in article 114 paragraph 2 in conjunction with article 132 paragraph 1 of RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as regulated and threatened by crimes according to Article 114 paragraph 1 of RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics

Keywords: Criminal Act, Narcotics, Dealer

How to Cite: Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pongedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), 5 (1) 2018: 1-7.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan narkotika, pada awalnya narkotika untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif (Dikdik & Gultom, 2007). Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika), menyebutkan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Tujuan penggunaan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 3 UU Narkotika menyebutkan bahwa Undang-undang dibuat untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran adanya stock narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh Undang-undang.

UU Narkotika juga member kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini sering berkaitan dengan satu sama lain. Mencegah penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar sampai ke tingkat paling bawah.

Demikian pula sebaliknya dengan memberantas peredaran gelap narkotika

tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi serta sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Narkotika, yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk: 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; 2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan 3) Memberantas peredaran gelap narkotika.

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negative yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. (Nainggolan, Zahara., & Saparuddin, 2010), Sehingga narkotika perlu diatur secara khusus seperti yang dinyatakan oleh Gatot Supramono bahwa: "Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala

campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pengedar

Putusan
NO.2071/Pid.sus/2016/PN.Mdn.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dan lapangan yaitu penelitian yang dilakukan

dengan pendekatan yuridis normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier. Adapun penjelasan terhadap jenis penelitian ini adalah bahan hukum primer sekunder dan tertier.

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah observasi dari lapangan dan penyebaran angket yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisa data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas

menyebutkan bahwa Narkotika dilarang untuk memiliki, menggunakan, menjual. Dalam pasal 112,113,114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 menghukum pelaku tindak pidana Narkotika selama 9 tahun. Apabila seseorang tidak melaporkan tetapi melihat bahkan bersama-sama turut serta untuk memudahkan si pelaku Narkoba meskipun tidak memakai dapat diancam pidana dengan pasal 55 KUHP yaitu: turut serta melakukan kejahatan. Di Indonesia pihak kepolisian mencatat hampir 80% anak remaja di Indonesia telah menggunakan Narkoba, maka dari itu pihak pemerintahan memberi bimbingan ataupun rehabilitasi apabila anak-anak yang sudah terjatuh ke dunia Narkoba dapat diselamatkan demi terciptanya generasi bangsa yang sehat tanpa Narkoba. Pengadilan Negri Medan mencatat hampir rata-rata 80% masyarakat di Medan (Sumatera Utara) terkait kasus tindak pidana Narkotika dan telah dijatuhkan vonis oleh Hakim.

Untuk pengedar sanksinya dipenjara selama 10 tahun dan didenda sebanyak 500 juta rupiah. Tetapi apabila pengedar itu berstatus bandar atau bosnya maka dia dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan dihukum mati dan didenda 1 milyar rupiah. Untuk penyimpang atau pembuat narkoba sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10 juta rupiah.

Sanksi-sanksi di atas terdapat di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkoba). UU No. 5 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika). Sanksi-sanksi diatas terdapat didalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkoba). UU No. 5 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika). Isi dari UU No. 22 Tahun 1997 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang

mampu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (undang-undang No. 22 tahun 1997) yang termasuk jenis narkotika adalah: 1) Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja; 2) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina serta campuran-campuran dan sediaan- sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandarax, Fernobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide), dsb. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan

adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila digtentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi :“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Aturan ppidanaan sebagaimana ditunjukan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur tersendiri oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan ppidanaan dalam UU No.35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.

Hal sama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001, sebagai berikut: “Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan”.

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan TNI, selaras dengan hal tersebut juga maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai conoh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan. Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas: a). Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba atau Prekursor Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129; b) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129; c) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129; d)

Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129; e) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126; f) Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13); g) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan; bahwa Setiap Penyalah Guna: 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116; dan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, beberapa literature bahwa yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Crime without victims), dari persepektif tanggung jawab korban, Self-victimizing victims adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

SIMPULAN

Penerapan hukum sesuai dengan hasil penelitian pada putusan NO. 2071/Pid.SUS/2016/PN-Mdn maka penegakan hukum pidana bagi pelaku

tindak pidana narkoba dikaitkan dengan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, maka Majelis hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana telah terpenuhi yaitu: terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan serta memutuskan perkara tindak pidana narkoba pada putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/PN-Mdn adalah telah terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Narbuko, C. & Achnadi, A. (2002), *Metode penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Dikdik, M.A.M. & Gultom, G., (2007) *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, B.L. Simanjuntak, Y.N. & Hage, M.Y. (2006) *Teori Hukum*. Surabaya: CV.KITA, 2006
- <http://kausarabidin.blogspot.co.id/2015/05/resume-dasar-penghapus-peringatan-dan.html>
- <http://www.hukumprodeo.com/asas-asas-hukum-pidana-perbarengan-concursus/>
- Juliana, L.F.R, Sutrisna, W.N. (2013). *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tijauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nainggolan, M. Zahara, E. & Saparuddin, (2010), *Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Mercatoria, 3 (2): 116-132
- Sastrawidjaja, H.M, (2000). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Undang-Undang No 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.